



KERENTANAN USAHA KECIL: FAKTOR PENGARUH, DAMPAK, DAN SOLUSI

Dede Mulyanto¹

Abstract

The concern on the criticality and the influencing conditions is expected to be the basic of developing strategy of empowering women in small enterprises effectively. This passage is going to describe the heterogeneous aspects of small enterprises criticality in their social contexts.

Kerentanan Usaha, Risiko, dan Guncangan

Pada intinya, kerentanan adalah kondisi ketika suatu usaha tidak mempunyai kemampuan menghindari, menghadapi, dan melindungi diri dari risiko-risiko dan guncangan yang disebabkan oleh perubahan keadaan yang negatif.² Risiko sendiri secara umum sering dibatasi sebagai "a situation or event in which something of human value (including humans themselves) has been put at stake and where the outcome is uncertain" (Jaeger dkk, 2001:17).³ Risiko dan guncangan

dalam usaha kecil bisa terjadi karena beberapa sebab, misalnya usaha tersebut memasuki suatu arena baru sehingga harus mengalami perubahan internal, seperti usaha mikro yang 'naik kelas' menjadi usaha kecil dan harus menghadapi pasar, persaingan, dan kendala yang belum pernah dialami. Atau bisa juga risiko dan guncangan terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang berdampak terhadap usahanya, seperti lonjakan harga bahan baku dan produk, fluktuasi yang tajam terhadap

¹ Peneliti pada Yayasan AKATIGA

² Terdapat banyak batasan tentang kerentanan (vulnerability) yang bisa digunakan. Tetapi, pada dasarnya kerentanan berhubungan dengan keadaan mudah 'jatuh', 'sakit', atau 'runtuh'nya sesuatu (lihat Musser, 2002).

³ Untuk diskusi lebih lanjut mengenai penggunaan dan batas-batas konsep risiko, lihat Jaeger dkk. (2001).

permintaan barang, perubahan kebijakan tingkat suku bunga kredit, pengurusan dan perubahan kebijakan tata kota lainnya, atau terjadinya bencana.

Kondisi rentan suatu usaha tidak bisa disamakan dengan keadaan usaha yang tidak bisa berkembang. Oleh karena itu persoalan yang berkaitan dengan pengembangan usaha, seperti ketersediaan modal usaha, tidak bisa dilihat sebagai faktor utama untuk menggambarkan kerentanan. Suatu usaha yang tidak bisa mengembangkan diri belum tentu rentan, misalnya usaha mikro mandiri yang sedikit sekali bergantung kepada pihak lain, baik dalam asupan (bahan baku dari kebun sendiri dan modal dari uang sendiri), maupun pemasaran (sudah ada pelanggan tetap di daerahnya sendiri). Meskipun usaha seperti ini tidak bisa menumpuk modal untuk pengembangan usaha, tetap tidak bisa dikatakan rentan, karena lonjakan harga bahan baku atau meningkatnya suku bunga kredit perbankan tidak memberi pengaruh besar terhadap usaha tersebut. Sebaliknya, suatu usaha yang mampu mengembangkan diri, tetapi karena memiliki ketergantungan pada salah satu pihak dan sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi ekonomi yang lebih luas, maka pada saat terjadi perubahan yang negatif usaha tersebut bisa digolongkan rentan.⁴

Kedua contoh di atas merupakan contoh ekstrim. Ada rentang yang diisi banyak kemungkinan kombinasi keadaan usaha, untuk menggolongkan usaha berdasarkan derajat kerentanannya. Karenanya, tidak ada karakteristik dan bentuk khusus kerentanan usaha kecil-mikro. Keragaman jenis hasil, kondisi geografis, waktu, kemampuan ekonomi, kondisi politik, institusional pelaku usaha, latar belakang budaya, dan masih banyak lagi faktor lain yang dapat menjadikan keragaman karakter kerentanan usaha kecil merentang luas.⁵

Meski demikian, ada beberapa ciri umum risiko, yang tentunya akan berbeda-beda pada tiap usaha, yang potensial menimpa (perempuan) usaha kecil di Indonesia. Pertama, diskriminasi yang mungkin dihadapi pelaku usaha kecil yang memasuki kegiatan ekonomi informal. Meskipun semenjak lama orang percaya (terutama setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1998 yang banyak meruntuhkan usaha-usaha besar) bahwa usaha kecil di sektor informal merupakan penyumbang penting dalam perekonomian nasional, namun kenyataannya dalam sudut pandang kebijakan yang mementingkan investasi besar, kedudukan usaha kecil seringkali didiskriminasikan. Contohnya dari segi permodalan, seringkali usaha besar meski memiliki

⁴ Sebagai contoh lihat Widyaningrum, dkk. (2003).

⁵ Watts dan Bohle (1993:46 dikutip Musser, 2002) misalnya, menyatakan bahwa "*vulnerability is a multi-layered and multi-dimensional social space which centers on the determinate political, economic, and institutional capabilities of people in specific places at specific times*".

tunggakan hutang cukup besar tetap 'dimaafkan', tetapi tidak demikian dengan usaha kecil.⁶ Selain itu, diskriminasi ini juga bisa terjadi karena kebijakan pemerintah yang memberikan angin segar bagi sekelompok pelaku dalam rantai usaha untuk melakukan monopoli dalam perdagangan komoditi tertentu (Widyaningrum, dkk., 2003).

Berkaitan dengan perempuan pengusaha kecil, kemungkinan risiko diskriminasi berdasarkan gender bisa terjadi. Risiko diskriminasi ini biasanya mendapat pembenaran dari norma bersama, baik norma tradisional maupun yang berasal dari pengaruh luar, meskipun sumber diskriminasi itu sendiri tidak selalu berasal dari lingkungan setempat (bisa berasal dari negara maupun LSM). Persoalannya adalah bagaimana perempuan pengusaha kecil memandang dan menanggapi sesuatu yang menurut pandangan emik sebagai diskriminasi gender dalam usaha pada kerangka budaya dan lingkungannya. Kadangkala, dalam kehidupan suatu komuniti, perbedaan berdasarkan gender tidak serta merta

menjadi sumber risiko diskriminasi terhadap perempuan. Perbedaan gender berisiko melahirkan diskriminasi ketika campur tangan pihak luar masuk ke dalam kehidupan setempat, misalnya intervensi negara dalam persoalan kepemilikan lahan, serta pengaruhnya dalam perubahan pandangan dan perilaku terhadap kerja dan hasil kerja perempuan (Li, 2003). Oleh karena itu kita tidak bisa sewenang-wenang menilai suatu masyarakat dengan mengatakan mereka memiliki ciri asal yang mendiskriminasi perempuan. Mungkin saja keadaan itu terjadi karena pengaruh luar. Selain itu, sebagai praktik sosial, diskriminasi berdasarkan gender juga tidak terjadi terhadap semua perempuan di semua ruang waktu. Ada banyak faktor untuk memungkinkan terjadinya praktik ini. Masing-masing faktor terdiri dari komposisi yang berbeda-beda untuk tiap-tiap individu. Dari berbagai faktor tersebut, paling tidak, kemampuan politik, ekonomi, dan kelembagaan merupakan faktor penting terjadinya praktik diskriminasi, entah dari sisi pelaku ataupun korban.

⁶ Keengganan perbankan mengucurkan kredit untuk usaha kecil-mikro tercermin dari porsi kredit usaha kecil (KUK) terhadap total kredit yang cenderung mengecil dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Bank Indonesia, porsi KUK per Juni 2004 saja, hanya sebesar Rp.69,94 triliun, atau 14,4 persen dari total kredit. Porsi tersebut menurun drastis dari akhir tahun 2003 yang sebesar 16,9 persen. Kecenderungan mengecilnya porsi KUK ini kian tampak jika dibandingkan dengan porsi pada semester pertama 2003 yang sebesar 17,3 persen (Kompas-16/08/04). Selain itu, usaha-usaha kecil pun kesulitan untuk memperoleh kredit tersebut karena persyaratan yang kadang memberatkan. Sudut pandang pinjaman saat ini masih cenderung berpihak pada perbankan ketimbang pada usaha kecil-mikro. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh kenyataan bahwa usahalah yang harus berubah mengikuti prosedur perbankan; bukannya perbankan mengikuti kebutuhan usaha (misalnya kasus Bank Grameen di Asia Selatan). Hal ini juga menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah dan lembaga keuangan masih setengah-setengah.

Ketidakmampuan suatu usaha untuk menghindari atau menghadapi risiko dan guncangan menyebabkan suatu usaha menjadi rentan. Tidak adanya pilihan merupakan salah satu faktor penentu mengapa suatu usaha tidak mampu menghindari dari risiko dan guncangan. Ketiadaan pilihan ini menyebabkan usaha kecil tidak mampu berpaling ke arah lain untuk menyelamatkan diri. Faktor lain yang juga dapat mengakibatkan terjadinya ketidakmampuan adalah ketergantungan. Ketergantungan itu sendiri tidak memberikan dampak buruk selama diikuti dengan norma saling membantu dan tanpa keserakahan. Ketergantungan menjadi bencana bagi yang lemah, ketika hubungan tersebut lebih menguntungkan yang 'kuat' lewat perampokan nilai lebih, yaitu saat pelaku usaha yang lemah tidak mempunyai banyak pilihan. Ketergantungan demikianlah yang kemudian melahirkan risiko eksploitasi (Cross, 1997).⁷ Selama masih ada

pilihan dalam hubungan usaha, entah dalam asupan (bahan baku, modal) maupun dalam pemasaran, maka risiko eksploitasi bisa dihindari. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, penciptaan jaringan alternatif merupakan solusi terhadap risiko eksploitasi.⁸ Risiko eksploitasi ini juga bisa terjadi dalam hubungan usaha yang dilakukan oleh (perempuan) pengusaha kecil terhadap (perempuan) buruh yang bergantung padanya.

Eksplorasi juga bisa terjadi karena hubungan kolusif dalam rantai perdagangan (asupan dan keluaran) antara pemilik modal besar dengan pemerintah, yang menciptakan iklim pemusatan jalur asupan dan keluaran oleh beberapa pelaku yang mampu (secara ekonomi, sosial, dan politik) untuk berkolusi dengan oknum pemerintah (Widyaningrum, dkk., 2003:92-4).

⁷ Mengenai analisis konseptual ketergantungan, kewirausahaan, dan eksploitasi dalam ekonomi informal lihat Cross (1997). Untuk contoh kasusnya lihat Widyaningrum (2003) yang menemukan bahwa ketergantungan pengusaha furnitur kayu pada eksportir yang bertindak sebagai prinsipal, dan ketergantungan eksportir pada kehendak importir yang mampu menekan untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan mereka, mengakibatkan terjalannya hubungan eksploitatif oleh pihak yang kuat kepada yang lebih lemah. Meskipun demikian, kesejahteraan pengusaha furnitur yang 'rentan' ini lebih baik ketimbang pengusaha gula kelapa di Jawa Tengah (lihat laporan Dewayanti dan Chotim, 2004) sehingga mampu mengumpulkan surplus lebih banyak untuk tameng di kala guncangan. Risiko eksploitasi biasanya lebih dialami oleh usaha kecil yang tergolong dalam industri klaster. Usaha klaster umumnya mempunyai pasar yang sama dengan banyak usaha lain dalam satu wilayah, dan umumnya pemasarannya dilakukan melalui pedagang perantara. Selain kesamaan pasar, usaha-usaha klaster juga mempunyai kesamaan kebutuhan bahan baku. Kemungkinan risiko eksploitasi terjadi karena usaha bergantung pada asupan dan keluaran produksi melalui satu perantara saja. Selain usaha klaster, usaha-usaha yang menjalankan hubungan kerja 'putting out' atau subkontrak dengan satu eksportir juga rentan terhadap risiko eksploitasi. Ketergantungan asupan dan keluaran sekaligus pada satu pihak (produsen besar) akan memungkinkan perilaku eksploitatif terhadap yang lebih lemah posisi tawarnya; meskipun kondisinya mungkin lebih makmur dan memiliki kemampuan untuk berkembang ketimbang usaha mandiri (self-employed) di perdesaan yang memiliki pasar setempat.

⁸ Untuk kasus usaha gula kelapa dan genteng lihat Dewayanti dan Chotim (2004).

Sebagai usaha yang pada umumnya tergolong *household-based enterprise*, cadangan ekonomi usaha kecil umumnya tumpang tindih dengan cadangan ekonomi rumah tangga. Karena itu guncangan dalam ekonomi rumah tangga akan langsung mempengaruhi usaha. Terserapnya cadangan modal usaha untuk tujuan konsumsi rumah tangga memang sesuatu yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari di dalam usaha informal. Hal ini tidak serta merta mempengaruhi kerentanan usaha. Yang umumnya menjadi persoalan bukan penggunaan cadangan modal usaha itu sendiri, tetapi kemungkinan akan habisnya cadangan modal usaha untuk konsumsi, sehingga pada saat terjadi guncangan cadangan usaha tidak ada sama sekali dan usaha akan terancam ambruk.

Guncangan, Modal, dan Kerentanan Usaha: Kemungkinan Solusi

Seperti dalam suatu arena pertandingan, pelaku usaha harus mempunyai seperangkat tameng yang penting sebagai penahan risiko dan guncangan, atau menepis hambatan yang bakal dihadapi. Untuk dapat

bertahan, pelaku usaha harus mempunyai modal⁹ yang cukup untuk dapat digunakan dalam mengembangkan mekanisme pertahanan diri melalui siasat yang memadai guna menghindari dampak negatif perubahan keadaan. Mekanisme pertahanan diri ini menjadi semacam strategi adaptasi terhadap perubahan keadaan karena risiko, guncangan, atau hambatan yang bisa memperburuk keadaan. Untuk mempunyai mekanisme pertahanan diri, beberapa prasyarat harus dipenuhi, yaitu memiliki cadangan aset, modal sosial yang kuat, dan pengetahuan kewirausahaan.

Ketersediaan cadangan aset: sekadar ekonomi?

Tabungan dan investasi menjadi tameng yang diperlukan ketika sewaktu-waktu mengalami guncangan. Peristiwa-peristiwa seperti lonjakan harga bahan baku, fluktuasi harga produk, atau kemalangan anggota keluarga, bisa menjadi guncangan yang dapat meruntuhkan usaha jika tidak ada cadangan modal. Aset yang cukup berupa tabungan bergantung pada kemampuan unit usaha untuk menghasilkan *surplus*

⁹ Modal yang dimaksud di sini tidak dalam arti yang biasa dalam analisis Marx tradisional (dan ilmu ekonomi umumnya). Modal adalah hubungan sosial, dalam arti suatu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam arena perjuangan, di mana ia memproduksi dan mereproduksi. Dalam praktik sosial, modal berkaitan dengan kepemilikan obyektif (kekayaan ekonomi dan budaya). Karenanya modal di sini tidak hanya merujuk pada modal ekonomi, tetapi juga modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik (Bourdieu, 1989; Jenkin, 2004); dan bisa juga ditambah modal tubuh (*body capital*) yang merupakan tempat keempat modal tersebut ditubuhkan dan dikomunikasikan lewat tubuh sosial pelaku (Jackson dan Palmer-Jones, 2000:150). Bahkan bagi usaha mikro yang tergolong miskin, tubuh merupakan aset terpenting dalam usahanya. Selama tubuh bisa 'dimanfaatkan' (sehat, tidak terpenjara), maka usahanya akan tetap bisa berjalan (Narayan, dkk., 2000:95).

yang bisa mereka simpan atau investasikan dalam kapasitas produktif dan melanggengkan jaringan sosial. Kemampuan untuk menghasilkan *surplus* dan menyisihkan keuntungan juga dipengaruhi kondisi masyarakat pada umumnya, termasuk budaya kewirausahaan dan pola konsumsi. Perubahan-perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak terduga, seperti turunnya nilai tukar rupiah, lonjakan harga bahan baku, kelangkaan suplai energi, atau guncangan politik yang berpengaruh pada ekonomi nasional, tidak hanya akan menghantam usaha, tetapi juga pelaku usaha itu sendiri sebagai warga komunitas. Karenanya, ketersediaan aset dan kemampuan mencajarkan laba tidak sepenuhnya harus dilihat sebagai kemampuan manajerial semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial-budaya tempat usaha tersebut dijalankan.

Pembentukan kelompok-kelompok usahawan yang memiliki kesamaan kepentingan, umumnya menjadi salah satu solusi persoalan cadangan aset bagi mereka yang relatif miskin. Kelompok-kelompok ini bisa membentuk semacam koperasi yang berfungsi menyediakan berbagai sarana produksi dan pengorganisasian distribusi. Kepemilikan bersama atas sebagian sarana produksi dan distribusi ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan usaha secara bersama-sama. Keberadaan kelompok semacam koperasi ini perlu pengendalian yang ketat dari anggotanya, agar tidak terjadi eks-

plorasi oleh tirani dalam kelompok. Untuk itu, diperlukan modal sosial yang kuat di antara sesama anggotanya. Prasyarat utama keberadaan kelompok ini adalah adanya kesamaan identitas, saling percaya, dan adanya pemain aktif yang dipercaya semua pihak untuk menggalang kebersamaan. Pemain aktif tersebut selayaknya datang dari antara mereka sendiri, meskipun bisa juga berasal dari pihak luar kelompok, seperti dari LSM atau pemerintah. Tetapi, risiko pemanfaatan secara eksploitatif oleh sebagian pihak atas 'modal sosial' ini, bisa saja terjadi.

Karena menabung bukan sekadar karena adanya *surplus*, tetapi juga menyangkut kerangka budaya dan lingkungan sosial, maka pelatihan-pelatihan tidak akan banyak memberikan manfaat langsung tanpa adanya nilai hemat dan pranata menabung. Selain itu menabung juga memerlukan kondisi di mana masyarakat bisa mengendalikan sifat konsumtif. Hal ini menjadi sulit karena pola hidup konsumtif semakin gencar dilancarkan melalui berbagai media massa yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sementara itu inflasi nilai rupiah membuat harga kebutuhan hidup semakin meningkat. Salah satu contoh adalah kisah PERSEPSI di Klaten. Konon, ada upaya salah satu kelompok pendamping yang memproduksi barang kelontong, seperti sabun cuci, sabun mandi, dan menjualnya dengan harga murah untuk pasar setempat, terutama bagi anggota Jarpuk (Jaringan Pengusaha Kecil).

Hal ini dimaksudkan agar anggota Jarpuk setempat tidak bergantung pada barang kebutuhan sehari-hari yang diproduksi perusahaan besar yang lebih mahal. Dengan demikian diharapkan mereka dapat menyisihkan laba untuk mengembangkan usaha mereka. Namun upaya tersebut hanya berjalan beberapa bulan saja, selanjutnya anggota Jarpuk kembali menggunakan produk yang diiklankan media massa. Sekarang, siapa pula yang sanggup menghadapi kekuatan dan menghindari dampak negatif iklan media massa (elektronik)?

Cadangan aset atau kekayaan yang cukup merupakan prasyarat penting ketahanan suatu usaha. Tetapi hal tersebut bukanlah prasyarat utama. Cadangan aset atau kekayaan yang dimiliki tidak akan bekerja dengan baik dalam suatu usaha tanpa diubah menjadi modal yang memang dibutuhkan oleh bidang usaha tersebut, serta dikaitkan dengan modal-modal lain yang juga dibutuhkan.¹⁰

Modal Sosial dalam Usaha Ekonomi

Meskipun diakui ada sisi buruk modal sosial, namun banyak juga yang mengakui bahwa modal sosial dalam bentuk jaringan sosial, entah terkait

langsung dengan usaha atau tidak, merupakan 'tabungan' lain yang penting sebagai tameng. Secara umum modal sosial dibatasi sebagai *"the institutions, the relationships, the attitudes, and values that govern interactions among people and contribute to economic and social development"* (van Staveren, 2000:1). Batasan ini belum menampung aspek individual dari modal dan lebih menekankan kepada aspek struktural. Hal ini menjadi suatu kekurangan karena dalam praktik sosial aspek struktural ini hanya sekadar menjadi sumberdaya bagi pelaku untuk berpraktik. Oleh karena itu, Long (2001:132) menekankan bahwa modal sosial adalah

"capacity of individual to command scarce resources by virtue of their membership in network or broader social structure... the resources themselves are not social capital, the concept refers instead to the individual's (and group's) ability to mobilise them on demand."

Karena itu dalam tulisan ini modal sosial akan lebih dilihat sebagai kemampuan mengelola sumberdaya sosial-budaya seperti jaringan sosial.

Hubungan sosial sebagai sumberdaya modal sosial yang dikelola sedemikian rupa sehingga sewaktu-waktu bisa

¹⁰ *Wealth, the ultimate basis of power, can exert power and exert it durably, only in the form of symbolic capital (Bourdieu, 1989:195). Economic power lies not in wealth but in the relationship between wealth and a field of economic relations, ... it is in this relationship that wealth is constituted, in the form of capital, that is, as the instrument for appropriating the institutional equipment and the mechanisms indispensable to the functioning of the field, and thereby also appropriating the profit from it (Bourdieu, 1989:184-5).*

diaktifkan sebagai jejaring pengan, tidak serta-merta terbangun. Perlu semacam 'investasi' yang harus ditanam. Hubungan bantuan mensyaratkan adanya panduan normatif yang bisa menggerakkan pihak-pihak terkait untuk membantu, yaitu kewajiban saling bantu. Kewajiban ini memerlukan 'investasi'.¹¹ Karenanya bantuan dari teman, kerabat, patron, atau tetangga tidak akan begitu saja bisa 'dicairkan' kapanpun kita menghendaki. Harus ada 'premi sosial' yang musti dibayar (Benda-Beckman dan Benda-Beckman, 2000).

Kerja-kerja sosial atau kerja sukarela untuk 'kepentingan' orang lain atau komuniti¹² memang bisa dilihat sebagai hambatan atau penghamburan uang, waktu, dan tenaga dari pelaku usaha untuk kepentingan yang tidak secara langsung terkait dengan

pengembangan usahanya.¹³ Bahkan hubungan-hubungan yang idealnya bersifat resiprokal-mutualisme ini bisa menjelma menjadi hubungan eksploitatif. Tetapi, dalam sorotan konsep investasi hubungan bantuan, kerja-kerja demikian, meskipun menyita uang, tenaga, dan waktu yang mungkin sebenarnya bisa diinvestasikan dalam bentuk modal usaha tambahan, justru penting untuk menumbuhkan panduan normatif kewajiban membantu. Keaktifan dalam kelompok-kelompok arisan antar tetangga, antar anggota keluarga, atau antar sesama pengusaha kecil, merupakan salah satu bentuk investasi sosial membangun jaringan hubungan bantuan. Hal ini diperlukan sebagai tameng pada saat guncangan menimpa. Persoalannya kemudian adalah bagaimana mengatur hubungan-hubungan investatif ini sedemikian rupa sehingga hubungan bantuan ini terus berlangsung dan

¹¹ Pembahasan lebih lanjut mengenai kaitan investasi sosial dan usaha lewat studi kasus lihat Szanton (2000).

¹² Seperti membantu selamatan, memenuhi undangan pernikahan, kerja bakti kampung, dll.

¹³ Misalnya Dewayanti dan Chotim (2004) yang memandang kerja-kerja sosial demikian, atau dalam istilah mereka disebut sebagai 'kegiatan pengelolaan komunitas' (h. 25), sebagai salah satu faktor kultural yang merugikan perempuan usaha kecil dan menambah beban yang sudah mereka tanggung sehingga menghambat usaha. Selain itu mereka juga memandang negatif hubungan patron-klien, padahal hubungan patronase merupakan salah satu wahana penyaluran bantuan. Selama patron tidak bisa menyediakan bantuan untuk klien yang mengalami kesusahan, maka hubungan tersebut, bisa dikatakan, berhenti secara moral. Salah satu kewajiban patron adalah menyediakan 'jaminan sosial'. Selama kewajiban moral dalam hubungan tersebut tidak dipenuhi, maka hukuman sosial siap menimpa pelanggarnya. Dalam kasus penyaluran zakat misalnya, Scott menemukan di Sedaka bahwa salah satu pertimbangan yang dilihat patron adalah adanya hubungan patronase dengan calon penerima; termasuk dalam hubungan kategorial anutan politik (lihat Scott, 1979; 1984). Mengabaikan kewajiban ini sama saja menyediakan peluang untuk dihukum secara sosial; dan dalam kehidupan komuniti perdesaan, hukuman sosial lebih kejam ketimbang penjara. Penelitian Boomgaard (2000) tentang mitos 'kekayaan haram' menemukan bahwa mitos mengenai tuyul, pesugihan, dll., merupakan semacam kendali komuniti terhadap anggota komuniti yang 'kaya' (para patron) agar tetap menjadi sumber 'jaminan sosial' bagi anggota yang tidak beruntung; atau menjadi semacam moralitas kendali redistribusi.

semakin luas, sambil tetap bisa berproduksi dengan baik, karena bisa saja upaya membangun hubungan bantuan ini menjadi ajang eksploitasi oleh pihak yang lebih berkuasa. Kecurigaan Dewayanti dan Chotim (2004:85-6) terhadap pengaruh buruk 'kerja bakti' ini, terutama dalam kerangka hubungan patronase, terhadap kelangsungan usaha perempuan di perdesaan memang bisa dimaklumi. Tetapi hal ini jelas menunjukkan sudut pandang ekonomi murni yang melalaikan kedudukan pelaku usaha sebagai individu sosial sebagai bagian dari komunitas yang tidak mungkin hidup terisolasi. Terutama bagi mereka yang tinggal di perdesaan, melalaikan kerja-kerja seperti ini sama saja memutuskan hubungan sosial yang potensial sebagai jaring pengaman di kala susah. Kewaspadaan pada dampak buruk hubungan sosial yang mensyaratkan 'investasi sosial' memang perlu, tetapi tidak perlu menghilangkannya dalam upaya penguatan usaha kecil.

Tampaknya, kecurigaan mereka lebih dilandasi ketergesaan mengenai konsep hubungan patronase dan ikatan saling-bantu di dalamnya (karena keduanya menggunakan konsep patron-klien yang sudah banyak sekali dibahas ilmuwan sosial). Di satu sisi misalnya, Dewayanti dan Chotim (2004:85) menulis bahwa:

"...Hubungan ini dikembangkan sebagai mekanisme ikatan dari

patron terhadap klien, dalam hal ini usaha-usaha mikro. *Hubungan-hubungan sosial ini berfungsi 'membungkus' motif ekonomi. Bentuk hubungan patron-klien ini dikembangkan untuk 'menekan' biaya-biaya ekonomi secara keseluruhan yang seharusnya dikeluarkan oleh patron"* (cetak miring DM).

Tetapi, di sisi lain, secara konseptual mereka menyatakan bahwa:

"...hal ini (maksudnya hubungan patronase; pen.) terungkap dalam berbagai bentuk, misalnya, *memberikan hadiah pada hari besar keagamaan tertentu, memberikan pinjaman pada situasi-situasi sulit, seperti anggota keluarga yang sakit, penyelenggaraan pesta, dan meminjam untuk kebutuhan sehari-hari.* Hubungan-hubungan ini yang biasa disebut dengan hubungan patron-klien. Dalam konteks ini, hubungan ekonomi berubah menjadi bentuk hubungan pribadi yang kompleks dan berkelanjutan sehingga sulit untuk dipisahkan untuk waktu yang panjang sekalipun" (idem:33, cetak miring oleh DM).

Selain itu untuk kasus Jawa, keduanya mengutip uraian Hayami dan Kikuchi (1987) yang mengatakan bahwa patronase adalah:

"Hubungan atau ikatan *dyadic* dua pihak yang menyangkut suatu persahabatan; seseorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan

pengaruh dan sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan dan atau keuntungan bagi seseorang yang statusnya lebih rendah (*client*) dengan imbalan dalam bentuk pemberian dukungan dan bantuan secara umum termasuk pelayanan pribadi kepada bapak (*patron*) tadi." (idem:33)

Hubungan patronase, secara ideal, bukan hubungan monolog. Patronase merupakan bentuk hubungan pertemanan yang (lebih) instrumental. Meskipun demikian, seperti halnya hubungan duaan (*dyadic relationship*), pertukaran energi bersifat timbal-balik. Selama patron masih menyediakan bantuan modal, pinjaman untuk masalah keterdesakan kebutuhan, pemberian-pemberian, dan begitu pula sebaliknya dengan klien, maka selama itu pula hubungan ini bisa berjalan tanpa sanksi sosial.

Hubungan ekonomi (dan politik) memang merupakan bagian dari hubungan sosial. Hubungan birokratis ala Weber yang diterapkan dalam hubungan ekonomi justru menjadi kian dihindari. Pendekatan-pendekatan pribadi merupakan modal (sosial) penting dalam berusaha. Apalagi dalam konteks usaha perdesaan.

Memang harus diakui bahwa ketika kapitalisme sebagai sistem ekonomi

merambah semua tempat, ada semacam dilema bagi pengusaha yang hidup dalam komunitas dengan ikatan-ikatan tradisional yang masih kuat, yang oleh Evers (1994) disebut sebagai '*traders' dilemma*'. Di satu sisi, sebagai pelaku usaha, cara pikir dan perilakunya harus sesuai dengan nalar ekonomi dengan menjunjung nilai keuntungan. Di sisi lain, sebagai anggota suatu komunitas, keterikatan terhadap dunia sosial dan kewajiban-kewajiban yang tidak secara langsung terkait dengan usaha, bisa dipandang mengurangi keuntungan dan upaya hemat. Solusi yang diajukan oleh Evers, dkk. (1994) adalah mengembangkan jiwa kewirausahaan dengan berpola pikir dan bertindak dalam kerangka ekonomi murni agar bisa tetap bertahan dan mengembangkan diri sebagai suatu usaha ekonomi (maksudnya harus dibedakan dengan usaha amal). Namun sebagian penelitian lain (Li, 2000; Berger dkk., 1991; Hefner, dkk., 2000) menunjukkan bahwa pelaku usaha sebagai warga komunitas tidak bisa melepaskan ikatan-ikatan sosial tanpa merugikan usahanya di masa depan. Bahkan, hubungan-hubungan bantuan berdasarkan identitas kesukubangsaan, agama, atau kesamaan asal daerah, memainkan peranan penting dalam kelangsungan dan pengembangan usaha ekonomi.¹⁴ Karena, bagaimanapun, kegiatan ekonomi adalah bagian dari dunia sosial.

¹⁴ Ada banyak kasus yang bisa dijadikan bukti dari Berger (1991), Mackie (2000), Szanton (2000), dan banyak lagi hasil penelitian yang menunjukkan arena wirausaha sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia sosial. Hal ini membuktikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, hubungan sosial dan identitas budaya merupakan bagian dari kegiatan usaha sebagai landasan ketahanan dan pengembangan usaha.

Selain dalam hubungan sosial tradisional (pertetangaan, kekerabatan, dan patronase), pengikatan hubungan bantuan juga bisa dibangun melalui pengelompokan pengusaha dengan kepentingan sama (Jarpuk, misalnya). Keragaman hubungan yang dibina dengan beraneka kelompok, paling tidak memberikan pengusaha banyak pilihan jaring pengaman. Namun, pengorganisasian kelompok pengusaha hanya merupakan salah satu jaring pengaman, bukan satu-satunya.

Kewirausahaan: manajerial, bakat, atau budaya?

Pendidikan kewirausahaan, diakui atau tidak, mempunyai peran penting sebagai salah satu sumberdaya (modal) yang bisa dijadikan energi pertahanan diri dari guncangan usaha. Yang dimaksud dengan pendidikan di sini adalah modal kultural berupa pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan langsung dengan usaha dan pengembangannya, entah yang didapat lewat pendidikan formal, non-formal, informal, maupun pengalaman hidup. Pendidikan dalam keluarga yang merupakan wahana sosialisasi nilai-nilai kewirausahaan merupakan salah satu sumber pembentukan 'jiwa' kewirausahaan. Pengetahuan mengenai arus uang dan barang, informasi

harga bahan baku dan produk, perkembangan kebijakan pemerintah (berkenaan dengan energi, bahan mentah, transportasi, dan perbankan), keuletan, inovatif, dan visi, mutlak diperlukan untuk mampu mengantisipasi guncangan-guncangan yang tak teraba. Modal kultural ini tidak bisa diperoleh hanya lewat pendidikan formal, apalagi sekadar pelatihan atau kursus-kursus singkat, tetapi melalui tradisi atau budaya usaha yang tidak bisa didapat dalam waktu singkat. Selain itu, pengetahuan kewirausahaan ini juga harus terus-menerus direproduksi lewat jaringan sosial seperti teman, kerabat, rekanan usaha, dan termasuk juga dalam organisasi-organisasi sekepentingan (Jarpuk, misalnya).¹⁵

Seandainya pelatihan-pelatihan masih akan terus diberikan, maka sebaiknya sasarannya bukan lagi kepada pengusaha langsung dengan pelatihan manajerial semata, tetapi terhadap keluarga dengan 'pelatihan' kewirausahaan. Menumbuhkan kebiasaan berpikir dan bertindak secara wirausaha kepada anggota keluarga dan tetangga memang bukan merupakan solusi yang akan langsung terasa hasilnya. Kemampuan untuk bertahan terhadap risiko dan guncangan, serta kemampuan mengembangkan usaha tidak bisa diperoleh hanya lewat pelatihan manajerial. Oleh karena itu tanpa pendarah-

¹⁵ Ada beberapa kasus menarik yang dicatat dari pengalaman keseharian pendamping dan perempuan pelaku usaha kecil mengenai pentingnya pengetahuan sebagai modal kultural di Klaten dalam tulisan Winarni, dkk. (tanpa tahun).

dagingan pranata wirausaha, semua pelatihan akan sia-sia, dan hanya menghabiskan dana proyek.

Soal Solusi Lembaga Keuangan

Tidak ada solusi *mujarab* untuk semua bentuk dan karakter usaha kecil. Dari wilayah permodalan, kerentanan bisa terjadi karena cadangan modal usaha yang sedikit, sehingga tidak bisa membentengi kerugian atau pengeluaran mendesak karena guncangan. Dari wilayah produksi, kerentanan bisa muncul karena lonjakan harga atau kelangkaan bahan baku dan energi. Sedangkan dari wilayah pemasaran, risiko eksploitasi, hilangnya pasar karena persaingan dengan usaha yang lebih kuat, atau fluktuasi tajam harga produk, bisa menyumbang derajat kerentanan usaha.

Dari tiga wilayah itu saja, akan sangat beragam kemungkinan solusi yang bisa ditawarkan. Akses ke lembaga keuangan formal memang bukan solusi satu-satunya menghadapi masalah cadangan modal. Pinjaman lebih dekat dengan persoalan pengembangan usaha. Namun, adanya jaminan memperoleh pinjaman di masa sulit merupakan salah satu hal penting bagi ketahanan usaha. Jaminan cadangan uang dari luar ini harus bisa menutupi kebutuhan segera yang sering kali tiba-tiba datangnya. Ketersediaan pinjaman yang cepat, ringan, dan tidak memberatkan, merupakan salah satu cara meningkatkan ketahanan

menghadapi guncangan. Oleh karena itu, cadangan uang dalam kegiatan arisan bukan solusi keterdesakan kebutuhan dana menghadapi guncangan. Dari sifatnya sendiri yang merupakan pranata penyimpanan uang berotasi, arisan tidak bisa dijadikan jalan keluar perolehan dana penanganan guncangan usaha tiba-tiba. Sebagai sarana jaring pengaman, kelompok arisan memang bisa menyediakan kemungkinan bantuan pinjaman dari antara anggotanya. Namun, sebagai pranata penyimpanan uang berotasi, arisan tidak bisa menjadi sandaran jaminan tersedianya dana penanganan guncangan mendadak (Nugroho, 2001). Maka, selain kelompok simpan-pinjam di antara pengusaha kecil, solusi lainnya yang mungkin adalah lembaga keuangan formal.

Kondisi perkreditan diharapkan mengalihkan perspektif pemberian pinjaman ke sudut pandang pelaku usaha. Misalnya, dengan memberi bunga yang seringan mungkin, prosedur pengajuan yang tidak berbelit-belit, serta menjalin hubungan secara sosial dengan kelompok-kelompok pelaku usaha lewat kerjasama dalam melembagakan kegiatan arisan bersama lembaga keuangan. Kebiasaan menjalin hubungan dengan nasabah secara personal yang membuat para rentenir lebih populer di mata pengusaha kecil sebagai tempat peminjaman uang dibandingkan dengan lembaga bank (Nugroho, 2001), meskipun kerugian yang akan ditanggung biasanya jauh lebih besar.

Selain karena adanya jalinan ikatan personal, alasan lain mengapa masih banyak pengusaha kecil yang terus berhubungan dengan rentenir adalah karena prosedur yang lebih mudah dan waktu yang singkat dalam memperoleh pinjaman (1 hari).¹⁶ Aspek cepat dan mudah ini menjadi sesuatu yang penting untuk keperluan yang mendesak. Ada prasyarat mutlak yang mesti dipenuhi untuk menciptakan hubungan personal antara nasabah dan lembaga keuangan, yaitu kepercayaan. Adalah hal yang wajar bila lembaga keuangan menginginkan jaminan pengembalian pinjaman, karena mereka bukan merupakan lembaga amal. Solusi yang umumnya ditawarkan adalah lewat formalisasi usaha.

Dari sisi pelaku usaha, harus disadari bahwa lembaga keuangan pun merupakan suatu usaha, yang tentu juga menginginkan keuntungan seperti halnya mereka sendiri. Untuk meyakinkan pihak lembaga keuangan perlu dilakukan pengorganisasian pelaku-pelaku usaha sedemikian rupa sehingga bisa meyakinkan pihak perbankan bahwa mereka bisa memperoleh keuntungan lewat kerjasama dengan kelompok. Pengorganisasian kelompok seperti ini tidak hanya menunjukkan besarnya jumlah anggota (sehingga akan besar pula pinjaman yang diajukan), tetapi juga

meyakinkan lembaga keuangan bahwa para pelaku usaha memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Peran Pengorganisasian dalam Pemberdayaan Perempuan Pengusaha Kecil

Aksi tanggap dan siasat pengorganisasian

Aksi tanggap adalah cara yang dilakukan oleh individu, baik perorangan maupun kelompok, yang timbul dari kesadaran praktis dalam menghadapi kondisi tertentu. Cara ini bisa dalam bentuk tindakan dalam kerangka kelembagaan dominan maupun tindakan-tindakan alternatif, yang bisa menjadi penguat daya tahan ketika terjadi guncangan dari risiko sosial. Perjuangan merupakan salah satu aksi tanggap alternatif terhadap pranata dominan yang menindas. Perjuangan memiliki aneka bentuk, mulai dari perjuangan yang dilakukan melalui organisasi politik antarbangsa terhadap wacana dominan tak-adil, hingga perjuangan yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari lewat kebisuan, penentangan keputusan suami, kepura-puraan, kemalasan, berbohong, dan lain-lain, yang oleh Scott disebut dengan istilah 'senjatanya orang-orang lemah'.¹⁷

¹⁶ Nugroho (2001); Widyaningrum (2002:85). Salah satu alasan responden meminjam pada BMT, dalam penelitian Widyaningrum (2002:81), adalah prosedur yang lebih mudah (51,3% responden) dan persyaratan yang lebih ringan (46,7%).

¹⁷ Scott (1979).

Perjuangan sebagai aksi tanggap alternatif memberi perempuan pilihan. Artinya tidak hanya *nrimo* terhadap semua risiko sosial sebagai satu-satunya pilihan dan menganggap risiko tersebut sebagai kodrat keperempuannya yang sudah tercatat dalam *lauhf al-mahfuz*. Dalam kepustakaan kerentanan, memang 'ketiadaan pilihan' merupakan salah satu aspek kerentanan.

Memang benar bahwa pengorganisasian merupakan salah satu bentuk perjuangan. Bahkan Scott berani menyatakan bahwa terorganisasinya suatu gerakan perjuangan merupakan salah satu syarat keberhasilan mencapai tujuan.¹⁸ Mengaktifkan modal sosial, budaya, dan ekonomi sekaligus lewat pengorganisasian juga bisa menjadi cara melawan. Banyak orang yakin bahwa berorganisasi dan berserikat adalah penting untuk menyehatkan kehidupan bermasyarakat, karena menyerukan hak-hak yang terhalangi, menggugat penindasan, atau melancarkan perjuangan bisa dilakukan lewat organisasi. Nyatanya di banyak konstitusi negara modern, berorganisasi merupakan bagian dari unsur hak asasi manusia. Tetapi tidak semua organisasi bisa menjadi senjata yang tepat sasaran. Di masa Orde Baru misalnya, organisasi-organisasi formal perempuan lebih dimanfaatkan penguasa sebagai wahana penjinakan (*domestication*) perempuan, sekaligus wahana penyebaran ideologi gen-

der yang dianut negara, yang oleh sebagian feminis dipandang tidak adil. Organisasi perempuan yang lahir dari rahim konsep pembangunan bergaya atas-bawah menjadikan perempuan sebagai bagian dalam struktur dan organisasi yang diciptakan dan dikontrol oleh pemerintah. Perempuan tidak bisa, bahkan dilarang, mengidentifikasi tujuan-tujuan dan kebutuhan alternatif dalam bidang pribadi maupun sosial, serta mengerahkan kemampuan untuk mencapainya. Lalu organisasi macam apa yang bisa jadi senjata perjuangan?

Dari kasus PKK atau Dharma Wanita di masa Orde Baru saja, kita bisa mengatakan bahwa organisasi bergaya atas-bawah justru melanggengkan kekuasaan dominatif negara atas perempuan. Jadi, saat ini yang masuk akal, atau paling tidak untuk tampil beda dengan masa lalu, tentunya adalah organisasi yang terbangun dari akar rumput; organisasi partisipatif yang sesuai dengan kepentingan perempuan. Apa benar demikian? Belum tentu! Ternyata selama ini ide pengorganisasian partisipatif perempuan lahir dari pendekatan pemberdayaan. Mulanya memang untuk menggantikan pendekatan lama yang mengabaikan keikutsertaan kalangan bawah dalam pembangunan yang nyatanya gagal menyejahterakan. Namun, praktik-praktik pengorganisasian partisipatif yang telah dilakukan nyatanya juga menyimpan sisi gelap atau mel-

¹⁸ *Ibid.*

hirkan sebetulnya tirani baru. Karena-nya perlu kritik terus-menerus.

Bentuk-bentuk tirani baru tersebut misalnya adalah keberadaan 'elit-elit' organisasi atau kelompok yang memanfaatkan otoritasnya untuk kepentingan 'karir' politik dan lupa mengangkat persoalan bersama kelompok; hanya menunggangi organisasi dan memanfaatkan kedudukan politiknya untuk kepentingan diri. Persoalan ini bisa terjadi karena pelembagaan otoritas ada di tangan segelintir orang. Pelembagaan ini potensial melahirkan 'kelas baru' dalam organisasi. Segelintir orang dalam 'kelas baru' inilah yang kemudian menjadi 'tiran-tiran' yang bisa menjadi kepanjangan tangan penindas (entah negara, otoritas kapitalis, partai), secara sadar ataupun tidak.

Sejarah perjuangan kaum tertindas di banyak wilayah menunjukkan bahwa keberadaan organisasi formal permanen dalam gerakan sosial, di mana otoritas dilembagakan dan dipegang oleh segelintir 'elit', justru menjadi wahana paling mudah bagi negara atau otoritas lain untuk mengendalikannya.¹⁹ Keberadaan organisasi permanen yang otoritasnya terlembaga secara formal dengan struktur perintah dan tujuan-tujuan yang relatif tetap justru akan memudahkan tangan-tangan otoriter yang lebih

besar, entah dari negara maupun otoritas kapitalis, untuk memasukkan alat-alat peninaboboan. Seperti semua organisasi otoritarian, kedisiplinan dalam menjalankan struktur organisasi untuk mencapai tujuannya lebih bersifat disiplin heteronomi, berupa keberadaan struktur formal yang kuat, yang bisa mendisiplinkan anggotanya dari 'atas' dengan keberadaan 'pemerintah' yang terlembagakan secara formal. Dengan demikian organisasi hanya sebagai wadah penjinakan dan alat *status quo* untuk mengendalikan potensi perubahan sosial yang justru bisa menyapakan mereka dan lembaga mereka sendiri, entah karena pelarangan maupun kehilangan sumber dana.

Berdasarkan hal di atas perlu adanya kritik secara terus-menerus, terutama kritik dari dalam (anggota) organisasi sendiri untuk bisa mengikis sisi gelapnya. Namun demikian, proses demokratisasi dalam organisasi saja belum cukup, melainkan perlu juga diwujudkan kehidupan demokrasi partisipasi yang komunikatif di dalam organisasi serta pengorganisasian kelompok-kelompok.

Selain itu, persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan dalam usaha kecil tidak bisa secara sederhana dirujuk pada satu sumber saja. Keterkaitan antarwilayah sosial

¹⁹ Wieringa (1999) memberi contoh bagaimana Gerwani yang mulanya netral secara politik dengan beragam kalangan perempuan yang membangunya, akhirnya dikooptasi oleh PKI dan menjadi corong gerakan komunis PKI. Gerwani disapu gelombang pasang Komunisme sehingga unsur-unsur feminis dan unsur non-PKI tersingkirkan sampai tiba kehancurannya pasca kup 1965

(kekerabatan, politik, ekonomi, budaya) mengakibatkan munculnya persoalan di satu wilayah, misalnya diskriminasi perempuan usaha kecil di arena ekonomi yang bisa dibentuk secara rumpil oleh pelaku, pranata, kebiasaan, norma, atau nilai di wilayah sosial lain. Praktik-praktik penindasan pun merentang dalam beragam bentuk dan derajat ketampakannya, dari yang paling jelas terlihat, seperti kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga, hingga kekerasan simbolik berupa hegemoni golongan berkuasa lewat pendidikan dan media massa.²⁰

Dikaitkan dengan konsep arena perjuangan, struktur modal, dan tampakan persoalan yang dihadapi perempuan, maka perjuangan menuju keadaan yang lebih baik tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri dan hanya terpaku pada satu kemungkinan sumber persoalan (umumnya yang nampak di permukaan saja).

Bersatu Kita Teguh: pengorganisasian bersama sebagai perempuan atau sebagai golongan terpinggirkan?

Karena aksi tanggap merupakan hasil pengolahan kesadaran praktis, maka organisasi yang salah satu aspeknya

adalah kesadaran menjadi penting. Misalnya kesadaran 'bersatu kita teguh' yang dilandasi oleh kenyataan bahwa ada penindasan terhadap golongan tertentu, dan bahwa warga golongan tersebut harus bersatu melawannya. Dalam kasus perempuan, persoalannya adalah apakah akan bersatu sebagai golongan perempuan atau sebagai sesama golongan tertindas. Tentu saja jawabannya akan beraneka ragam, seberagam teori sosial pergerakan feminis yang ada.

Lepas dari riuhnya perdebatan di kalangan teoretisi pergerakan perempuan²¹, banyak juga orang percaya bahwa bidang-bidang penindasan tidak berasal dari satu sumber. Dunia sosial dialiri sungai dari banyak mata air. Sumber risiko sosial perempuan tidak bisa hanya dialamatkan pada ideologi dan tatanan gender patriarki, tetapi juga nalar dan praktik otoritas negara, ekonomi, budaya, dan bahkan praktik gerakan feminisme sendiri²² ikut menyumbang beban risiko sosial perempuan. Karenanya, perlu perubahan sosial menyeluruh, dan ini berarti perlu solidaritas antar unsur tertindas atau sekutu potensial dalam masyarakat, untuk menuju pada perubahan yang lebih baik.

Dalam konteks lingkup kecil, misalnya

²⁰ Mengenai ulasan empiris dan konseptual mengenai kekerasan simbolik terhadap perempuan dikaitkan dengan reproduksi sosial dan pembagian kerja antargender. Lihat Kraiss (1993:161-168).

²¹ Keriuhan ini misalnya dibahas Freedman (2001) atau Saptari dan Holzner (1997:420-434).

²² Untuk diskusi lebih lanjut mengenai perdebatan penindasan perempuan terhadap perempuan, kontradiksi gerakan politik feminis, konsep 'perempuan' yang dianut yang mempengaruhi nalar dan praktik teori dan

pemberdayaan ekonomi perempuan pengusaha mikro dan pengorganisasian serta penyebaran kesadaran politik, yang disasar tidak bisa hanya perempuan, karena justru sebagian besar usaha merupakan usaha rumah tangga yang setiap anggota rumah tangga mempunyai peran penting dalam memajukannya. Selain itu, sebagai bagian dari komuniti, perempuan bukan satu-satunya yang 'harus' berubah. Perubahan sepihak hanya menguatkan tekanan perjuangan dari pihak yang tidak ingin berubah, yang berarti semua usaha akan sia-sia. Selama perubahan hanya bersifat sebagian, maka sebagian yang lain akan menekan sedemikian rupa, sehingga penyesuaian terjadi tanpa perubahan menyeluruh. Pertanyaan berikutnya: lalu untuk apakah pengorganisasian ada? Sekadar penyadaran atau gerakan sosial?

Hasil ikutan atas dua pilihan di atas berbeda-beda. Jika kesadaran sebagai tujuan dekat suatu pengorganisasian, maka pengandaianya masyarakat atau golongan sosial tertindas belum memiliki kesadaran bahwa mereka tertindas dan harus berjuang melawan penindasan. Karenanya, aksi tanggap yang dilakukan lebih pada kegiatan pendidikan penumbuh kesadaran. Sedangkan pilihan atas gerakan sosial, mengandaikan

golongan tertindas sudah sadar dan tinggal mengorganisasi diri untuk bertindak menentang penindasan.

Tetapi, apapun pilihan yang diambil sebagai titik pijak pengorganisasian, hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pengorganisasian penting untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kepentingan golongan tertindas. Pengorganisasian diri adalah salah satu modal dalam praktik perjuangan, setidaknya di arena perjuangan politik, karena bagaimanapun, rendahnya tingkat keberdayaan politik dan organisasi merupakan salah satu sebab kerentanan sosial.²³

Perjuangan juga berkait dengan masalah citra. Sebagai salah satu modal terpenting yang perlu dikembangkan untuk membangun struktur modal yang kuat dalam perjuangan di arena 'politik' menuju perubahan sosial, pengorganisasian gerakan perempuan (tentu saja organisasi gerakan lain juga) harus mempunyai jalur yang baik ke media dan mampu membuktikan bahwa ia mewakili golongan yang besar dan luas. Untuk mencapai tujuan ini langkah siasatnya adalah 'bersatu kita teguh' dengan kelompok-kelompok lain dengan meyakinkan bahwa persoalan yang dihadapi suatu golongan tertindas juga merupakan

gerakan feminis lihat Ramazanoglu (1989). Mengenai 'penindasan' feminis liberal dan radikal Barat terhadap perempuan di negara-negara Dunia Ketiga, paling tidak dalam pemaksaan konsep dan praktik politik yang mengabaikan tatanan sosial setempat di negara pasca-kolonial lihat Gandhi (1998).

²³ Untuk argumentasi lebih lanjut lihat Cook, Kabeer, dan Suwannarat (2003).

persoalan bersama yang bisa menimpa golongan orang yang rentan secara sosial lainnya.

Kesimpulan

Kerentanan mempunyai dua sisi, yaitu *internal* yang berkaitan dengan kemampuan usaha menangkul guncangan dan menghadapi risiko; serta *eksternal* yang berkaitan dengan risiko, guncangan, atau tekanan yang datang dari lingkungan. Seperti halnya kemiskinan, kerentanan merupakan kondisi multidimensi yang berkaitan dengan kemampuan politik, ekonomi, dan kelembagaan seseorang dalam suatu ruang-waktu tertentu.

Meskipun kerentanan dan kemampuan berkembang tidak serupa, tetapi kondisi rentan sangat mempengaruhi kemampuan usaha dalam mengembangkan diri. Perkembangan usaha akan terganggu jika usaha tersebut rentan terhadap guncangan. Karenanya, tujuan utama penanganan kerentanan adalah meningkatkan ketahanan usaha terhadap risiko dan guncangan yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan memperoleh *surplus* dan menyimpan cadangan modal untuk kemudian menjadi tameng di kala susah.

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penguatan usaha kecil, yaitu:

1. Penguatan kemampuan usaha mencadangkan keuntungan lewat

pelatihan manajerial dan menabung;

2. Peningkatan iklim usaha ekonomi yang sehat, yang mana kemampuan mencadangkan aset bisa dilakukan, misalnya dengan memberantas pungutan liar (dan pungutan tidak liar yang terlalu banyak), debirokratisasi penyelenggaraan perijinan dan penyelenggaraan usaha, atau menghilangkan praktik-praktik monopoli di tingkat tempatan (*local*);
3. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan tidak lagi difokuskan pada manajerial semata, tetapi prinsip-prinsip 'budaya' kewirausahaan;
4. Sosialisasi pentingnya jaringan sosial bagi kemajuan usaha dan penguatan organisasi para pengusaha kecil yang tidak hanya dalam kelompok kepentingan usaha kecil, tetapi juga lewat pemanfaatan organisasi-organisasi yang telah ada, terutama sebagai jaring pengaman di kala guncangan terhadap usaha dan rumah tangga terjadi;
5. Penguatan kelompok simpan-pinjam setempat dengan bantuan pelatihan manajerial dan dukungan politik dari pemerintah setempat agar bisa bersaing dengan rentenir;
6. Kerjasama lembaga keuangan dengan kelompok-kelompok pengusaha kecil yang tidak hanya terikat secara formal, tetapi juga *personal* sebagai cara mengalihkan peminjam dari jerat rentenir;
7. Penguatan posisi dan pengetahuan politik pengusaha kecil lewat

- pengorganisasian kelompok dengan kepentingan sama. Pengetahuan politik dimaksud bukan sekadar pendidikan pemilih, tetapi kemampuan berargumentasi dengan pihak berwenang, lobi dan tawar-menawar di tingkat lokal, dll.
8. Penyesuaian program-program bantuan bagi usaha kecil dari pemerintah dan pelaku sosial berkepentingan lainnya (termasuk LSM) dengan kepentingan dan kebutuhan usaha kecil senyaptanya.

Daftar Pustaka

- Albert, Michael, L. Cagan, N. Chomsky, R. Hahnel, M. King, L. Sargent, dan H. Sklar. 1986. *Liberating Theory*. Boston: South End Press.
- Andadari, Roos K., Ina Hunga, dan John Ihalauw. 1997. "Pungutan pada Usaha Kecil". *Jurnal Analisis Sosial*. (6) November:35-43.
- Benda-Beckmann, Franz von dan Keebet von Benda-Beckmann. 2000. "Jaminan Sosial, Sumberdaya Alam, dan Kompleksitas Hukum", dalam F. von Benda-Beckmann dkk. (ed.). *Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 23-60
- Berger, Brigitte (ed). 1991. *The Culture of Entrepreneurship*. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
- Bourdieu, Pierre. 1989. *Outline of a Theory of Practice*. London: Cambridge University Press.
- Cook, Sarah, Naila Kabeer dan Gary Suwannarat. 2003. *Social Protection in Asia*. New Delhi: Har-Anand Publication dan The Ford Foundation.
- Cross, John C. 1997. "Entrepreneurship & Exploitation: Measuring Independence and Dependence in The Informal Economy". *International Journal of Sociology and Social Planning*, 17,(3/4):37-63.
- Dewayanti, Ratih dan Erna E. Chotim. 2004. *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Perdesaan Jawa*. Bandung: AKATIGA dan ASPPUK.
- Evers, Hans-Dieter. 1994. "The Traders' Dilemma: a theory of the social transformation of markets and society" dalam Evers H-D dan H.

Schrader (ed). *The Moral Economy of Trade: Ethnicity and developing Markets*. London dan New York: Routledge. Hal 7-14

Finnegan, Gerry dan Katrine Danielsen. 1995. Promoting The Development of Women Entrepreneurs: means and ends in women entrepreneurship development. Makalah dipresentasikan pada First Intercultural Micro-enterprise Development Summit, Srilanka, 28 Agustus.

Freedman, Jane. 2001. *Feminism*. Buckingham: Open University Press.

Gandhi, Leela. 1997. *Post-Colonialism Theory: A Critical Introduction*. Indiana: University Press.

Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.

Haryatmoko. 2003. "Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial menurut Pierre Bourdieu". *Majalah Basis* 52(11-12) Nopember-Desember.

Hefner, Robert (ed). 2000. *Budaya Pasar: Masyarakat dan Moralitas dalam Kapitalisme Asia Baru*. Jakarta: LP3ES.

Henninger, Norbert. 1998. *Mapping and Geographic Analysis of Human Welfare and Poverty: Review and Assessment*. Washington: World Resources Institute.

Itoh, Makoto. 1995. *Political Economy for Socialism*. New York: St. Martin Press.

Jackson, Cecile dan R. Palmer-Jones. 2000. "Rethinking Gendered Poverty and Work" dalam Shahra Razavi (ed). *Gendered Poverty and Well-Being*. Oxford: Institute of Social Studies dan Blackwell.

Jaeger, Carlo C., Ortwin Renn, Eugene A. Rosa dan Thomas Webler. 2000. *Risk, Uncertainty, dan Rational Action*. London: Earthscan.

Li, Tania Murray. 2000. "Membangun Budaya Kapitalis: Problem Melayu Singapura dan mempertimbangkan kembali kewirausahaan", dalam Robert W. Hefner (ed.). *Budaya Pasar*. Jakarta: LP3ES. Hal 204-241.

_____. 2003. "Bekerja Terpisah Tetapi Makan Bersama: Kodrat, Kekayaan, dan Kekuasaan dalam Hubungan Perkawinan" *Jurnal Analisis Sosial* 8(2) Oktober.

- Long, Norman. 2000. *Development Sociology: actor perspectives*. London: Routledge.
- Machfud, Siti S.M.; dan Yatri I. Kusumastuti. 1991. "Peranan dan Status Wanita dalam Industri Rumahtangga di Jawa Barat: Kasus pengolahan pangan di Kabupaten Subang dan Majalengka, Jawa Barat". Project Working Paper Series No. A-19. Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB.
- Mackie, Jamie. 2000. "Keberhasilan Bisnis di Kalangan Orang Cina Asia Tenggara: Peranan Budaya, Nilai-nilai, dan Struktur Sosial" dalam Robert W. Hefner (ed). *Budaya Pasar*. Jakarta: LP3ES. Hal179-203.
- Musser, Laura. 2002. *Vulnerability Bibliography*. Boulder, CO.: Center for Science and Technology Policy Research University of Colorado.
- Narayan, Deepa, Robert Chambers, Meera K. Shah dan Patti Petesch. 2000. *Voices of the Poor: Crying Out for Change*. Oxford: University Press dan The World Bank.
- Nugroho, Heru. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purnamadewi, Yeti L. 1989. Wanita dan Industri Rumahtangga Anyaman Bambu di Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Laporan Proyek Penelitian Sektor Luar-Pertanian di Jawa Barat PSP-IPB-ISS-PPLH-ITB.
- Ramazanoglu, Caroline. 1989. *Feminism and The Contradictions of Oppression*. London: Routledge.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Grafiti Pers untuk Yayasan Kalyanamitra.
- Schiller, Barbara M. 1978. Women, Work, and Status in Rural Java. Thesis M.A. Ohio University. Tidak diterbitkan.
- Schroeder, Richard A. 1987. *Gender Vulnerability to Drought: A Case Study of the Hausa Social Environment*. Madison: University of Wisconsin Madison.
- Scott, James C. 1979. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant*

Resistance. New Haven dan London: Yale University Press.

- Stoler, Ann. 1983. "Struktur Kelas dan Otonomi Wanita di Pedesaan Jawa", dalam Koentjaraningrat (ed.). *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. Hal 167-196.
- Suryahadi, Asep dan Rizki Fillaili. 2004 "Pemetaan Upaya Penguatan Usaha Mikro". *Jurnal Analisis Sosial*, 9(2):143-155.
- Szanton, David L. 2000. "Moralitas Kontingen: Investasi Sosial dan Ekonomi di sebuah kota nelayan Filipina", dalam Robert W. Hefner (ed.). *Budaya Pasar*. Jakarta: LP3ES. Hal 352-375.
- van Staveren, Irene. 2000. *A Conceptualisation of Social Capital in Economics: Commitment and Spill-over Effect*. The Hague: Institute of Social Studies.
- van Velzen, Anita. 1990. "Women in Foodprocessing Industries in West Java: the production of kerupuk and marine product in small coastal village in Subang". Project Working paper series No. B-4. Institute of Social Studies Bandung Research Project Office.
- _____. 1990a. Women in Foodprocessing Industries in West Java: Production and labour relations in enterprises producing emping melinjo in Tuk, Cirebon. Project Working paper series No. B-7. Institute of Social Studies Bandung Research Project Office.
- van Velzen, Anita dan Titi Setiawati. 1990. "Women in Foodprocessing Industries in West Java: Home industries producing kerupuk and rice-sweets (wajit/dodol) in Cikoneng and Cililin". Project Working paper series No. B-6. Institute of Social Studies Bandung Research Project Office.
- Whitehead, Ann dan Matthew Lockwood. 2000. "Gendering Poverty: A Review of Six World Bank African", dalam Shahra Razavi (ed.). *Gendered Poverty and Well-Being*. Oxford: Blackwell. Hal 115-144.
- Widyaningrum, Nurul. 2002. *Model pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil: Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor*. Bandung: AKATIGA.
- _____. 2003. "Eksplorasi terhadap pengusaha kecil melalui rantai hulu-hilir. Kasus Studi: Industri mebel rotan dan jati". *Jurnal Analisis Sosial* vol.8, no.1 Februari.

- Widyaningrum, Nurul, Ratih Dewayanti, Erna E. Chotim dan Isono Sadoko. 2003. *Pola-pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil*. Bandung: AKATIGA.
- Winarni, Trisnawati dan Y. Susanti. t.t. *Perempuan Pedesaan, Pemiskinan & Agenda Pembebasan*. Klaten: PERSEPSI
- Wisner, Ben. 2001. *Notes on Social Vulnerability: Categories, Situations, Capability, and Circumstances*. Oberlin College.

